

Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia:

Dari Konsumsi ke Produktivitas

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Rudy C Tarumingkeng : *Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia -
Dari Konsumsi ke Produktivitas*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

4 Maret 2026

TRANSFORMASI STRUKTURAL EKONOMI INDONESIA: DARI KONSUMSI KE PRODUKTIVITAS

Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia sering dipuji sebagai ekonomi besar yang relatif tangguh. Pujian itu bukan tanpa dasar. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh **5,11 persen**, lebih tinggi daripada 2024 yang tumbuh **5,03 persen**. Produk Domestik Bruto nominal mencapai **Rp23.821,1 triliun**, sedangkan PDB per kapita mencapai sekitar **Rp83,7 juta** atau **US\$5.083,4**. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang tumbuh paling cepat pada 2025, sementara pada triwulan IV-2025 komponen investasi tetap, atau PMTB, tumbuh paling tinggi. IMF juga menilai bahwa pertumbuhan Indonesia tetap kuat, sekitar **5,0 persen pada 2025** dan **5,1 persen pada 2026**, meskipun ketidakpastian global, guncangan perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan masih tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah Indonesia masih tumbuh, melainkan **bagaimana Indonesia tumbuh**. OECD menegaskan bahwa konsumsi swasta masih menjadi mesin utama pertumbuhan Indonesia, sementara World Bank menilai bahwa untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi dalam dua dekade ke depan, Indonesia memerlukan pertumbuhan setidaknya sekitar **6 persen per tahun**. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir belum cukup untuk mendorong konvergensi pendapatan lebih cepat, karena pertumbuhan produktivitas tenaga kerja melambat. Di sinilah tema “transformasi struktural” menjadi sangat penting: Indonesia perlu bergerak dari pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi menuju pertumbuhan yang semakin bertumpu pada produktivitas, nilai tambah, inovasi, dan kualitas pekerjaan. ([OECD](#))

Esai ini berangkat dari tesis bahwa konsumsi tetap penting, tetapi **tidak cukup**. Konsumsi menjaga permintaan dan stabilitas jangka pendek, tetapi produktivitaslah yang menentukan seberapa cepat pendapatan riil dapat naik, seberapa luas lapangan kerja bermutu dapat tercipta, dan seberapa kuat Indonesia dapat bertahan dalam persaingan global. Transformasi struktural “dari konsumsi ke produktivitas” karena itu tidak boleh dipahami sebagai menyingkirkan konsumsi dari perekonomian, melainkan sebagai **mengubah fondasi pertumbuhan**: dari ekspansi yang ditopang pembelanjaan menuju ekspansi yang ditopang efisiensi, pembelajaran teknologi, formalisasi usaha, jasa modern, dan kapasitas produksi bernilai tambah tinggi. ([OECD](#))

1. Apa yang Dimaksud dengan Transformasi Struktural?

Secara akademik, transformasi struktural mengacu pada perpindahan tenaga kerja, modal, dan kegiatan ekonomi dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas lebih tinggi. Dalam sejarah pembangunan, transformasi struktural biasanya berarti berkurangnya dominasi pertanian tradisional, bertambahnya manufaktur dan jasa

modern, membesarnya kota, meningkatnya pendidikan, dan membaiknya kualitas institusi ekonomi. World Bank menilai bahwa Indonesia telah mengalami transformasi seperti ini: fondasi infrastruktur manusia dan fisik, tata kelola, dan stabilitas makro telah membantu pergeseran dari pertanian berproduktivitas rendah ke manufaktur dan jasa yang lebih produktif. Namun, kemajuan itu belum cukup dalam untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan pekerjaan yang lebih baik dalam skala besar. ([World Bank](#))

Dalam konteks Indonesia hari ini, transformasi struktural tidak lagi cukup dipahami sekadar sebagai perpindahan orang dari desa ke kota, atau dari pertanian ke pabrik. Tantangannya kini lebih kompleks. Pekerja dapat berpindah dari pertanian ke jasa, tetapi jika jasa yang mereka masuki adalah perdagangan eceran informal, akomodasi berupah rendah, atau pekerjaan platform dengan produktivitas terbatas, maka nilai tambah yang diciptakan tetap rendah. Demikian pula, investasi dapat meningkat pesat, tetapi bila investasi itu terkonsentrasi pada aktivitas bernilai rendah, maka transformasi yang dihasilkan hanya dangkal. Karena itu, transformasi struktural Indonesia pada fase sekarang harus dipahami sebagai pergeseran menuju **aktivitas bernilai tambah lebih tinggi**—baik dalam manufaktur, jasa, pertanian modern, maupun ekonomi digital. ([World Bank](#))

Dengan demikian, frasa “dari konsumsi ke produktivitas” pada judul esai ini tidak berarti menghapus peran konsumsi, melainkan menggeser pusat gravitasi pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi pendorong utama pertumbuhan, sebagaimana dicatat OECD, tetapi konsumsi pada dasarnya adalah **hasil** dari pendapatan. Agar konsumsi dapat bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan, pendapatan rumah tangga harus ditopang oleh pekerjaan yang lebih produktif, upah riil yang lebih kuat, dan perusahaan yang lebih kompetitif. Tanpa fondasi itu, konsumsi dapat bertahan untuk beberapa waktu, tetapi kualitas pertumbuhan akan tetap rapuh. ([OECD](#))

2. Pola Pertumbuhan Indonesia: Stabil, tetapi Masih Ditopang Konsumsi

Tidak dapat disangkal bahwa model pertumbuhan berbasis konsumsi telah memberi stabilitas bagi Indonesia. OECD menyatakan secara eksplisit bahwa konsumsi swasta masih merupakan mesin utama pertumbuhan Indonesia. Dalam konteks negara berpenduduk besar seperti Indonesia, hal itu masuk akal. Pasar domestik yang luas menolong ekonomi tetap bergerak bahkan ketika lingkungan global melemah. Konsumsi yang kuat juga menjadi bantalan ketika ekspor menghadapi tekanan. Karena itu, berbicara tentang pergeseran dari konsumsi ke produktivitas tidak berarti menafikan nilai strategis pasar domestik. Justru pasar domestik itulah yang dapat menjadi basis awal bagi skala ekonomi, pembelajaran bisnis, dan ekspansi industri. ([OECD](#))

Akan tetapi, ada batas bagi model pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi. Jika konsumsi tumbuh lebih cepat daripada produktivitas, maka pertumbuhan cenderung bersandar pada perluasan kredit, transfer fiskal, atau kenaikan pengeluaran yang tidak diimbangi oleh kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan tekanan inflasi, ketergantungan impor, dan stagnasi pendapatan riil. World Bank dalam laporan *Country Growth and Jobs Report* menilai bahwa pertumbuhan Indonesia sedang melambat dibanding masa lalu, dan untuk mencapai status negara maju pada 2045 Indonesia memerlukan laju pertumbuhan yang lebih tinggi—sekitar 6 persen atau lebih—yang tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan mesin pertumbuhan lama.

BPS memang mencatat bahwa pada 2025 ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi, sebesar **7,03 persen**, dan pada triwulan IV-2025 PMTB tumbuh **6,12 persen**. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia mulai memperlihatkan unsur rebalancing ke arah ekspor dan investasi. Namun, World Bank mengingatkan bahwa masalah

fundamental Indonesia bukan semata kekurangan investasi atau kurangnya aktivitas ekonomi, melainkan **komposisi** investasi dan aktivitas itu. Bila pertumbuhan tambahan masih terkonsentrasi pada kegiatan bernilai rendah, maka peningkatan PDB tidak otomatis diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Mengapa Konsumsi Tidak Bisa Menjadi Satu-Satunya Tumpuan?

Secara teoretis, konsumsi bersifat *demand-driven*, sedangkan produktivitas bersifat *supply-side*. Konsumsi memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa; produktivitas memperbesar kemampuan ekonomi memproduksi barang dan jasa tersebut dengan lebih efisien. Negara yang pertumbuhannya terlalu ditopang konsumsi akan menghadapi persoalan ketika kapasitas sisi penawaran tidak tumbuh sepadan. Dalam kondisi seperti itu, kenaikan permintaan dapat bocor ke impor atau mendorong tekanan harga. Sebaliknya, negara yang berhasil menaikkan produktivitas dapat menjaga konsumsi tetap kuat karena pendapatan, upah, dan keuntungan yang menopang konsumsi meningkat secara lebih sehat. ([IMF](#))

World Bank memberikan gambaran konkret mengenai keterbatasan pertumbuhan Indonesia saat ini. Laporan 2026 mereka menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat investasi yang tinggi, rata-rata lebih dari **30 persen PDB** selama 15 tahun terakhir, tetapi sekitar **70 persen** investasi itu masih mengalir ke manufaktur dan jasa bernilai rendah. Laporan yang sama juga menyebut bahwa pertumbuhan melambat dari rata-rata **5,4 persen** pada dekade sebelum 2020 menjadi **4,7 persen** pada 2021–2023. Ini memperlihatkan bahwa penambahan konsumsi dan investasi secara agregat belum cukup bila tidak diikuti oleh pergeseran komposisi ekonomi ke aktivitas yang lebih produktif. ([World Bank](#))

Di samping itu, ketergantungan pada konsumsi sangat sensitif terhadap kualitas pasar kerja. Bila rumah tangga memperoleh pendapatan dari pekerjaan informal, produktivitas rendah, dan upah yang lemah, maka daya beli akan rentan. BPS mencatat bahwa pada Agustus 2025 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi **4,85 persen** dan jumlah penduduk bekerja mencapai **146,54 juta orang**, tetapi World Bank menilai bahwa hampir **60 persen** pekerja masih berada dalam pekerjaan informal, dan sekitar **70 persen** pekerja bekerja di sektor yang menghasilkan nilai tambah kurang dari **Rp8 juta per pekerja per bulan**. Dengan struktur seperti itu, tidak mengherankan bila konsumsi dapat tetap tumbuh, tetapi lambat naik kualitasnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4. Produktivitas sebagai Fondasi Baru Pertumbuhan

Jika konsumsi adalah wajah yang tampak dari permintaan, maka produktivitas adalah mesin sunyi yang menentukan kecepatan kemajuan ekonomi. OECD menyatakan bahwa perlambatan konvergensi pendapatan Indonesia mencerminkan melambatnya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. World Bank bahkan menempatkan "productivity-led growth" di pusat strategi pertumbuhan dan pekerjaan Indonesia. IMF pun menilai bahwa reformasi struktural yang berani akan meningkatkan iklim bisnis, pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta, dan produktivitas. Ini menunjukkan adanya konsensus yang cukup kuat: tanpa kenaikan produktivitas, Indonesia akan sulit menembus jebakan pertumbuhan menengah. ([OECD](#))

Produktivitas di sini tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pekerja harus bekerja lebih cepat. Produktivitas adalah hasil dari teknologi yang lebih tepat, organisasi yang lebih efisien, logistik yang lebih baik, keterampilan yang lebih tinggi, regulasi yang lebih rasional, dan alokasi sumber daya yang lebih sehat. Dua pabrik dapat memakai jumlah pekerja dan mesin yang sama, tetapi pabrik yang terhubung dengan

pemasok lebih baik, memakai data lebih cerdas, dan diatur dengan manajemen yang lebih baik akan menghasilkan output lebih besar. Demikian juga dua pelaku UMKM dapat menjual produk yang mirip, tetapi yang satu lebih produktif karena punya pencatatan digital, pengemasan lebih baik, akses pasar lebih luas, dan pembiayaan formal. Dalam makna inilah produktivitas menjadi kata kunci transformasi.

([OECD](#))

Dari sudut kebijakan, pergeseran dari konsumsi ke produktivitas berarti Indonesia harus makin menilai keberhasilan ekonomi bukan hanya dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari indikator seperti: pertumbuhan nilai tambah per pekerja, kenaikan upah riil, penurunan informalitas, peningkatan investasi pada sektor bernilai tinggi, dan pertumbuhan ekspor yang lebih berbasis teknologi serta jasa modern. Jika indikator-indikator ini tidak membaik, maka pertumbuhan mungkin masih terjadi, tetapi fondasinya belum berubah. ([World Bank](#))

5. Struktur Investasi Indonesia: Banyak, tetapi Belum Tentu Tepat

Salah satu temuan paling penting dari World Bank adalah bahwa Indonesia sebenarnya **tidak kekurangan investasi secara agregat**. Masalah utamanya adalah kualitas dan arah investasi. Laporan *Country Growth and Jobs Report* menegaskan bahwa sekitar **70 persen** investasi dalam 15 tahun terakhir masuk ke manufaktur bernilai rendah—seperti makanan olahan tertentu dan logam dasar—serta jasa konsumtif seperti akomodasi dan makanan-minuman, bukan ke sektor-sektor yang lebih kompetitif secara global seperti otomotif, elektronik, farmasi, atau TIK. Dengan kata lain, akumulasi modal memang terjadi, tetapi tidak selalu memperbesar frontier produktivitas Indonesia. ([World Bank](#))

Implikasinya sangat serius. Pertumbuhan yang ditopang investasi ke sektor bernilai rendah cenderung menciptakan pekerjaan yang juga bernilai rendah. Karena itu, World Bank mencatat bahwa pangsa **middle-class jobs** turun dari **14 persen** pada 2019 menjadi hanya **8,4 persen**

pada 2023. Pekerjaan baru banyak muncul di perdagangan ritel, akomodasi, makanan-minuman, dan pertanian—sektor-sektor yang penting secara sosial, tetapi sering memberi upah dan produktivitas terbatas. Ini menunjukkan bahwa transformasi struktural Indonesia belum cukup kuat untuk memindahkan tenaga kerja ke kegiatan dengan produktivitas menengah-tinggi dalam skala besar. ([World Bank](#))

Karena itu, agenda “dari konsumsi ke produktivitas” harus mencakup **transformasi komposisi investasi**. Indonesia bukan hanya membutuhkan investasi yang lebih banyak, tetapi investasi yang lebih terkait dengan pembelajaran teknologi, ekspor, rekayasa, riset, dan jasa modern. Investasi yang menghasilkan pabrik dengan *local supplier linkages, training, sertifikasi, desain, dan kemampuan manajerial* akan jauh lebih penting daripada investasi yang sekadar menambah kapasitas produksi di sektor yang sudah lama ada. Dalam bahasa pembangunan, yang dibutuhkan ialah *upgrading*, bukan hanya *expansion*.

6. Industrialisasi: Jalan Utama Menuju Produktivitas

Dalam banyak diskusi kontemporer, industrialisasi kadang dianggap sebagai agenda lama yang sudah tergeser oleh ekonomi digital. Padahal pengalaman berbagai negara justru menunjukkan bahwa industri pengolahan tetap penting sebagai mesin produktivitas, ekspor, pembelajaran teknologi, dan penciptaan pekerjaan formal. BPS mencatat bahwa industri pengolahan masih menjadi salah satu lapangan usaha terbesar Indonesia dan pada triwulan-triwulan 2025 tetap tumbuh solid. World Bank juga menegaskan bahwa manufaktur secara historis merupakan sumber penting pekerjaan kelas menengah, tetapi peran itu melemah karena penciptaan kerja manufaktur bernilai tinggi tidak cukup kuat dan banyak pekerjaan tetap terkonsentrasi di pabrik lama yang kurang produktif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam kerangka transformasi struktural, industrialisasi penting bukan hanya karena ia menghasilkan barang. Industrialisasi penting karena ia

menciptakan **ekosistem kemampuan**: teknik, kualitas, desain, logistik, pembiayaan, standardisasi, dan jaringan pemasok. Bila Indonesia ingin bergerak dari konsumsi ke produktivitas, maka industrialisasi harus diposisikan sebagai sarana untuk menaikkan kompleksitas ekonomi. Ini berarti tidak cukup hanya membangun lebih banyak pabrik; Indonesia harus membangun pabrik yang lebih canggih, lebih terhubung dengan jasa modern, lebih terbuka pada inovasi, dan lebih padat pembelajaran.

Di sinilah hilirisasi dapat memainkan peran, tetapi hanya jika dipahami dengan benar. OECD mengakui bahwa industrial policy untuk pengolahan nikel telah menarik minat investor, tetapi mereka juga memperingatkan adanya risiko kapasitas berlebih dan dampak fiskal. Artinya, hilirisasi yang benar-benar produktif bukan yang berhenti pada pemrosesan awal, melainkan yang menumbuhkan industri turunan, laboratorium uji, rekayasa, *after-sales services*, dan pendidikan teknik. Jika tidak, Indonesia bisa saja meningkatkan nilai ekspor, tetapi tetap tidak sepenuhnya membangun kapabilitas yang dibutuhkan untuk lompatan produktivitas jangka panjang. ([OECD](#))

7. Jasa Modern: Pengungkit Produktivitas yang Sering Diremehkan

Transformasi struktural Indonesia tidak bisa hanya berbicara tentang manufaktur. Jasa modern juga merupakan bagian penting dari pergeseran menuju produktivitas. OECD dan World Bank sama-sama menekankan bahwa banyak jasa berperan sebagai *enabling sectors* bagi seluruh ekonomi: logistik, telekomunikasi, keuangan, konsultasi, bisnis digital, dan jasa profesional lainnya. World Bank dalam kajian 2026 tentang daya saing jasa menyebut bahwa jasa menyumbang sekitar **45 persen** PDB Indonesia pada 2024 dan penting sebagai pendorong pertumbuhan, tetapi produktivitas tenaga kerja sektor jasa masih tertahan, dan banyak subsektornya belum cukup kompetitif. ([World Bank](#))

Ini penting karena manufaktur modern tanpa jasa modern tidak akan efisien. Pabrik tidak akan kompetitif bila biaya logistik tinggi, telekomunikasi lambat, sertifikasi lambat, dan pembiayaan mahal. Petani tidak akan naik produktivitas bila tidak ada *cold chain*, gudang, sistem pembayaran digital, dan platform distribusi yang andal. UMKM tidak akan naik kelas bila akses software, desain, pemasaran, dan jasa profesional terlalu terbatas. Karena itu, pergeseran dari konsumsi ke produktivitas mensyaratkan penguatan jasa sebagai **infrastruktur tak kasat mata** bagi produktivitas sektor lain. ([World Bank](#))

World Bank juga menghitung bahwa reformasi pembatasan perdagangan jasa dapat menaikkan PDB Indonesia sekitar **1,14 persen** di atas skenario tanpa reformasi pada 2050 dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja, karena ekspansi jasa bernilai tinggi akan mendorong alokasi tenaga kerja ke peluang yang lebih produktif. Ini adalah temuan yang sangat relevan: jasa modern bukan lawan dari industrialisasi, tetapi pasangannya. Ekonomi Indonesia tidak akan produktif jika tetap memisahkan manufaktur dan jasa dalam dua kotak yang terpisah. ([World Bank](#))

8. Pasar Kerja: Dari Banyak Pekerjaan ke Pekerjaan yang Lebih Baik

Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya diukur dari banyaknya pekerjaan yang tercipta, tetapi juga dari **jenis pekerjaan** yang tercipta. BPS mencatat bahwa jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi **146,54 juta** pada Agustus 2025, dan TPT turun menjadi **4,85 persen**. Ini adalah capaian penting. Namun World Bank memberi peringatan bahwa penciptaan kerja beberapa tahun terakhir terlalu banyak terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah dan bernilai tambah rendah. Laporan mereka menegaskan bahwa hampir **60 persen** pekerja masih informal, dan sekitar **70 persen** pekerja berada pada sektor-sektor yang menghasilkan kurang dari **Rp8 juta** nilai tambah per pekerja per bulan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ini berarti Indonesia sedang menghadapi persoalan **kualitas transformasi tenaga kerja**. Secara agregat, ekonomi memang menyerap banyak pekerja. Tetapi jika pekerja itu masuk ke kegiatan yang produktivitasnya rendah, maka upah riil sulit naik cepat, kelas menengah sulit meluas, dan konsumsi berkualitas pun sulit berkembang. Tidak mengherankan jika World Bank menilai bahwa pertumbuhan pekerjaan kelas menengah Indonesia justru melemah sejak pandemi. Dengan demikian, transformasi struktural bukan sekadar soal mengurangi pengangguran, tetapi soal memindahkan tenaga kerja ke pekerjaan yang mampu menopang standar hidup yang lebih tinggi. ([World Bank](#))

Dari sudut kebijakan, hal ini menuntut strategi ganda. Pertama, menaikkan produktivitas sektor-sektor yang sudah banyak menyerap tenaga kerja, seperti pertanian, perdagangan, makanan-minuman, dan manufaktur ringan. Kedua, memperbesar pangsa sektor-sektor yang mampu menciptakan pekerjaan formal bernilai tambah lebih tinggi, seperti manufaktur menengah-tinggi, logistik modern, TIK, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan jasa profesional. Tanpa kombinasi ini, Indonesia mungkin tetap bisa menurunkan pengangguran, tetapi tidak cukup cepat memperkuat kelas menengah produktif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

9. Informalitas sebagai Hambatan Besar Produktivitas

Salah satu ciri struktur ekonomi Indonesia yang paling membatasi produktivitas adalah tingginya informalitas. OECD menyebut bahwa pasar kerja Indonesia masih rapuh dan tingkat informalitas tetap tinggi. World Bank memperkuat gambaran ini dengan menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan baru terkonsentrasi pada sektor dengan kualitas rendah, sementara hampir 60 persen pekerja tetap informal. Informalitas membuat usaha cenderung kecil, sulit mengakses pembiayaan, lemah dalam pencatatan, sulit tersambung ke pasar yang lebih besar, dan kurang terdorong untuk berinovasi. ([OECD](#))

Dalam kerangka “dari konsumsi ke produktivitas”, formalisasi sangat penting karena ia menghubungkan usaha dan pekerja dengan sistem yang lebih produktif: pembiayaan bank, kontrak formal, pelatihan, perlindungan sosial, sertifikasi, dan akses pasar yang lebih luas. Usaha informal memang sering menjadi bantalan sosial yang penting, tetapi bila terlalu lama bertahan dalam status subsisten, ia menahan transformasi struktural. Hal yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar “memaksa” formalisasi, melainkan membuat formalisasi **bernilai** bagi pelaku usaha: lebih mudah, lebih murah, dan memberi manfaat konkret. ([OECD](#))

Di sini negara berperan besar. Kebijakan yang terlalu rumit, biaya izin yang tinggi, atau ketidakpastian regulasi justru memperkuat insentif untuk tetap informal. Sebaliknya, ketika akses pembiayaan, pengadaan, pajak sederhana, dan platform digital formal dirancang dengan baik, usaha kecil memiliki alasan rasional untuk naik kelas. Maka, penurunan informalitas harus dilihat sebagai strategi produktivitas, bukan semata strategi penertiban administrasi.

10. Pendidikan, Keterampilan, dan Modal Manusia

Transformasi struktural tidak akan berhasil jika struktur keterampilan tidak berubah. OECD menegaskan bahwa Indonesia memerlukan peningkatan pendidikan, keterampilan, dan partisipasi kerja formal untuk mempercepat konvergensi pendapatan. Mereka juga menekankan bahwa kualitas pendidikan dasar masih sering rendah, keterampilan digital belum memadai, dan pendidikan STEM perlu diperluas. World Bank dalam laporan CGJR pun menempatkan *foundational infrastructure*—terutama modal manusia—sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan dan pekerjaan yang lebih baik. ([OECD](#))

Secara ekonomi, kualitas manusia menentukan seberapa efektif investasi dapat diubah menjadi produktivitas. Mesin modern, jaringan digital, atau kawasan industri tidak akan menghasilkan lompatan nilai tambah jika

tenaga kerja tidak mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan teknologi tersebut. Dalam konteks inilah investasi pada pendidikan dan pelatihan harus dibaca sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan semata kebijakan sosial. ADB pada akhir 2025 bahkan menyalurkan dukungan pembiayaan yang secara eksplisit ditujukan untuk memperkuat modal manusia Indonesia demi produktivitas. ([OECD](#))

Ada dua dimensi yang perlu ditekankan. Pertama, kualitas pembelajaran dasar: literasi, numerasi, sains, dan kemampuan berpikir kritis. Kedua, koneksi antara pendidikan dan pasar kerja: vokasi, politeknik, sertifikasi, *reskilling*, dan *upskilling*. Tanpa perbaikan pada dua bidang ini, Indonesia berisiko menghasilkan pertumbuhan yang tidak sinkron: ada investasi dan permintaan kerja, tetapi keterampilan pekerja tertinggal; atau sebaliknya ada lulusan, tetapi kesempatan kerja produktif tidak cukup terbuka. Transformasi struktural yang matang harus mempertemukan **kapasitas pekerja** dengan **kebutuhan ekonomi baru**. ([World Bank](#))

11. Digitalisasi sebagai Jalur Baru Produktivitas

Salah satu pengungkit terkuat untuk berpindah dari konsumsi ke produktivitas adalah digitalisasi. Namun digitalisasi yang dimaksud bukan sekadar bertambahnya pengguna internet atau perdagangan online, melainkan penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki proses produksi, logistik, pemasaran, data, dan manajemen. OECD menegaskan bahwa digital access and adoption among business di Indonesia masih tertinggal dibanding negara sebaya, dan penggunaan teknologi digital di sebagian besar sektor ekonomi masih relatif rendah. World Bank dalam presentasi *Digital Foundations for Growth* menunjukkan bahwa peningkatan broadband dapat menaikkan produktivitas perusahaan dan pendapatan per kapita secara signifikan. ([OECD](#))

Presentasi World Bank Desember 2025 menyebut bahwa kenaikan **10 poin persentase** pada penetrasi fixed broadband dapat meningkatkan GDP per kapita sekitar **0,85–1,43 persen**, dan bahwa kualitas broadband yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sekitar **3–6 persen**, berdasarkan bukti komparatif internasional. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam kecepatan internet seluler, penetrasi fixed broadband, dan kualitas konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Ini berarti ruang peningkatan produktivitas melalui infrastruktur digital masih sangat besar. ([The World Bank](#))

Di sinilah digitalisasi menjadi jembatan penting menuju transformasi struktural. Pertanian yang terhubung data dan pasar dapat menjadi lebih produktif. UMKM yang menggunakan pencatatan digital, sistem inventori, dan *marketplace* B2B dapat naik kelas. Industri yang memakai *predictive maintenance*, analitik produksi, dan software rantai pasok dapat mengurangi pemborosan. Pelayanan publik yang terdigitalisasi dapat menurunkan biaya transaksi ekonomi. Jadi, digitalisasi bukan sektor terpisah; ia adalah **lapisan efisiensi** yang bisa mendorong produktivitas di hampir semua sektor. ([OECD](#))

12. Perempuan, Demografi, dan Pemanfaatan Talenta Nasional

Produktivitas nasional tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi dan investasi, tetapi juga oleh apakah sebuah negara menggunakan seluruh potensi manusianya. OECD menyoroti bahwa Indonesia perlu mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi kerja dan menurunkan informalitas agar dapat memaksimalkan tenaga kerjanya. Mereka juga menilai bahwa mengalihkan pembiayaan cuti melahirkan dari pemberi kerja ke skema asuransi sosial dapat membantu memperkuat pekerjaan formal bagi perempuan. Ini bukan sekadar isu keadilan; ini juga isu produktivitas. ([OECD](#))

Negara dengan populasi besar seperti Indonesia mempunyai potensi demografis yang luar biasa, tetapi bonus demografi hanya menghasilkan pertumbuhan bila penduduk usia kerja masuk ke pekerjaan yang produktif. Bila sebagian besar pertumbuhan angkatan kerja justru terserap di sektor informal, pekerjaan bernilai rendah, atau bahkan menganggur terselubung, maka bonus demografi akan mengecil manfaatnya. Karena itu, transformasi struktural juga berarti memperkuat partisipasi kerja perempuan, memperluas kesempatan kerja formal bagi kaum muda, dan memastikan bahwa pertumbuhan kota dan industri tidak mengunci talenta dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah.

([OECD](#))

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Indonesia tidak hanya perlu pertumbuhan yang lebih besar, tetapi pertumbuhan yang menggunakan manusianya secara lebih cerdas. Setiap perempuan berpendidikan yang tertahan di luar pasar kerja formal, setiap lulusan muda yang hanya masuk pekerjaan subsisten, dan setiap pekerja terampil yang tidak menemukan industri yang relevan merupakan kehilangan produktivitas nasional. Itulah mengapa agenda modal manusia, partisipasi kerja, dan pekerjaan bermutu adalah bagian sentral dari pergeseran "dari konsumsi ke produktivitas." ([OECD](#))

13. Reformasi Regulasi, Persaingan, dan Perdagangan

Salah satu kesimpulan paling penting dari World Bank adalah bahwa Indonesia dapat membuka pertumbuhan yang lebih cepat dan pekerjaan yang lebih baik dengan menggeser fokus pada **business-enabling reforms** dan stabilitas regulasi. Laporan CGJR menyatakan bahwa kemajuan yang lebih lambat dalam regulasi, persaingan, dan perdagangan telah membuat sumber daya tetap terkonsentrasi pada aktivitas bernilai rendah serta menahan modal swasta. OECD pun menyatakan bahwa perbaikan lingkungan usaha, penurunan hambatan investasi dan perdagangan, penegakan *competitive neutrality*, dan

pengurangan hambatan non-tarif akan meningkatkan produktivitas serta integrasi perdagangan Indonesia. ([World Bank](#))

Mengapa hal ini begitu penting bagi tema kita? Karena produktivitas bukan hanya ditentukan oleh seberapa rajin perusahaan bekerja, tetapi juga oleh apakah aturan main membuat perusahaan produktif dapat tumbuh dan perusahaan tidak efisien tersingkir. Jika regulasi tidak pasti, proses izin lambat, hambatan masuk tinggi, dan kompetisi lemah, maka perusahaan dominan dapat tetap bertahan meski efisiensinya menurun. World Bank secara eksplisit menyebut bahwa akar masalah Indonesia terletak pada pasar yang tidak efisien, di mana pertumbuhan perusahaan semakin didorong oleh *market power* daripada produktivitas. ([World Bank](#))

Simulasi World Bank menunjukkan betapa besar dampak reformasi ini. Reforms persaingan dapat menaikkan GDP sampai **2,1 persen** dan upah riil **2,2 persen** di atas baseline pada 2040. Reformasi perdagangan jasa dapat menaikkan GDP sekitar **1,14 persen** pada 2050, dan kombinasi reformasi jasa serta pengurangan *non-tariff measures* pada barang dapat menaikkan GDP sekitar **8 persen** di atas baseline pada 2050, sekaligus meningkatkan pendapatan tenaga kerja setara dengan **21,4 juta pekerjaan yang lebih baik**. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa mesin produktivitas terbesar kadang bukan proyek fisik, melainkan **perbaikan aturan main ekonomi**. ([World Bank](#))

14. Urbanisasi dan Infrastruktur sebagai Bagian dari Transformasi Produktif

Transformasi struktural juga memiliki dimensi spasial. World Bank menekankan bahwa urbanisasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi pengungkit besar bagi pertumbuhan dan pekerjaan. Dalam laporan *People-First Housing* Juni 2025, World Bank menunjukkan bahwa pekerja di kawasan urban Indonesia rata-rata memperoleh pendapatan **40–50 persen lebih tinggi** daripada pekerja serupa di wilayah perdesaan,

mencerminkan produktivitas yang lebih tinggi di kota. Mereka juga menunjukkan bahwa reformasi perumahan dan lingkungan perkotaan dapat menciptakan ratusan ribu pekerjaan dan mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi. ([World Bank](#))

Mengapa ini relevan dengan tema dari konsumsi ke produktivitas? Karena kota yang efisien mempertemukan perusahaan, pekerja, universitas, jasa, dan pasar dalam jarak yang lebih dekat. Aglomerasi ini meningkatkan produktivitas. Namun urbanisasi yang buruk justru menurunkan produktivitas melalui kemacetan, harga tanah tinggi, ketidakcocokan lokasi rumah dan tempat kerja, serta lemahnya transportasi publik. Karena itu, investasi pada perumahan, transportasi massal, pelabuhan, jalan, dan konektivitas digital bukan sekadar proyek pembangunan fisik; ia adalah infrastruktur produktivitas. ([World Bank](#))

Bagi Indonesia, ini berarti strategi transformasi struktural harus berpikir lintas wilayah. Jawa memang masih mendominasi ekonomi nasional—BPS mencatat kontribusinya sekitar **56,93 persen** pada 2025—tetapi pertumbuhan masa depan membutuhkan lebih banyak kota dan kawasan produktif di luar pusat-pusat lama. Jika urbanisasi dan infrastruktur wilayah dapat dirancang untuk menyebarkan kesempatan kerja produktif lebih luas, maka transformasi struktural tidak hanya menaikkan PDB, tetapi juga mengurangi ketimpangan spasial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

15. Transisi Hijau dan Produktivitas Masa Depan

Produktivitas masa depan Indonesia juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana negeri ini menjalankan transisi hijau. OECD menyatakan bahwa Indonesia rentan terhadap dampak pemanasan global dan bahwa target *net-zero* pada 2060 menuntut percepatan dekarbonisasi, ekspansi energi terbarukan, modernisasi jaringan listrik, dan investasi transportasi publik. Mereka juga menegaskan bahwa biaya ekonomi dan manusia dari skenario emisi *business-as-usual* akan besar. Dengan demikian,

ekonomi hijau tidak seharusnya diposisikan sebagai agenda terpisah dari transformasi struktural, melainkan sebagai bagian dari mesin produktivitas jangka panjang. (OECD)

Transisi hijau dapat meningkatkan produktivitas setidaknya dalam tiga cara. Pertama, melalui efisiensi energi yang menurunkan biaya produksi. Kedua, melalui pembukaan industri baru seperti energi terbarukan, baterai, kendaraan listrik, kimia hijau, dan jasa lingkungan. Ketiga, melalui pengurangan kerugian ekonomi akibat polusi, kerusakan iklim, dan gangguan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, transisi hijau juga dapat memperkuat posisi ekspor jika dunia semakin menuntut jejak karbon yang lebih rendah dalam rantai pasok global. (OECD)

Dengan kata lain, pergeseran dari konsumsi ke produktivitas juga berarti berpindah dari pertumbuhan yang mengandalkan eksploitasi sumber daya tanpa transformasi menuju pertumbuhan yang makin hemat energi, lebih inovatif, dan lebih sadar nilai tambah jangka panjang. Negara yang terlambat melakukan pergeseran ini berisiko bukan hanya kalah dalam kompetisi industri masa depan, tetapi juga menanggung biaya penyesuaian yang lebih mahal. (OECD)

16. Dari Konsumsi ke Produktivitas: Apa Agenda Kebijakannya?

Jika semua uraian di atas dirangkum, maka transformasi struktural ekonomi Indonesia memerlukan agenda kebijakan yang terintegrasi. Pertama, Indonesia harus memperbaiki **lingkungan usaha, persaingan, dan kepastian regulasi** agar sumber daya mengalir ke aktivitas yang lebih bernilai tambah. Ini bukan isu kecil; World Bank justru menempatkannya sebagai pilar utama untuk membuka pertumbuhan dan pekerjaan yang lebih baik.

Kedua, Indonesia perlu mendorong **industrialisasi yang lebih canggih**, bukan hanya perluasan kapasitas di sektor yang sudah ada. Investasi harus ditarik ke manufaktur dan jasa bernilai tinggi, dengan *linkages* yang kuat ke pemasok domestik, pendidikan teknik, dan ekspor. Hilirisasi

harus diperhalus menjadi strategi *upgrading*, bukan sekadar penahanan bahan mentah. ([World Bank](#))

Ketiga, agenda **jasa modern dan digitalisasi** harus dipercepat. Reformasi perdagangan jasa, perluasan broadband, penyederhanaan regulasi digital, dan peningkatan kualitas konektivitas di sekolah, puskesmas, desa, dan UMKM adalah bagian penting dari strategi produktivitas. Tanpa ini, industrialisasi dan inovasi akan berjalan lebih lambat. ([World Bank](#))

Keempat, Indonesia harus memperlakukan **modal manusia dan formalisasi kerja** sebagai strategi ekonomi inti. Pendidikan dasar, vokasi, STEM, *reskilling*, perluasan partisipasi kerja perempuan, dan penurunan informalitas bukan agenda tambahan; semuanya adalah fondasi bagi pergeseran menuju pertumbuhan produktivitas. Tanpa pekerja yang lebih terampil dan usaha yang lebih formal, pertumbuhan akan tetap tersandera oleh kualitas yang rendah. ([OECD](#))

Kelima, agenda **urbanisasi produktif dan transisi hijau** harus masuk ke pusat strategi pertumbuhan. Kota-kota yang efisien, transportasi yang baik, perumahan terjangkau, energi yang lebih bersih, dan industri rendah karbon akan menentukan daya saing Indonesia dalam satu hingga dua dekade ke depan. Transformasi struktural bukan semata soal sektor, tetapi juga soal ruang, konektivitas, dan keberlanjutan. ([World Bank](#))

Penutup

“Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia: Dari Konsumsi ke Produktivitas” pada dasarnya adalah narasi tentang perubahan kualitas pertumbuhan. Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. PDB membesar, kemiskinan menurun, infrastruktur membaik, dan pertumbuhan tetap bertahan sekitar lima persen bahkan di tengah ketidakpastian global. Namun lembaga-lembaga utama—BPS, IMF,

OECD, dan World Bank—mengirim pesan yang hampir seragam: pertumbuhan yang ada sekarang belum cukup kuat kualitasnya untuk mengantar Indonesia menjadi ekonomi berpendapatan tinggi tanpa reformasi yang lebih dalam. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Konsumsi tetap penting dan akan tetap menjadi bagian vital dari ekonomi Indonesia. Tetapi konsumsi tidak boleh terus menjadi pusat gravitasi yang menutupi kelemahan struktural. Konsumsi yang sehat harus lahir dari produktivitas yang lebih tinggi, bukan dari ekonomi yang terus memperbesar aktivitas bernilai rendah. Karena itu, pergeseran yang dibutuhkan Indonesia bukan dari “konsumsi yang buruk” ke “produktivitas yang abstrak”, melainkan dari pertumbuhan yang bertumpu pada pembelanjaan menuju pertumbuhan yang bertumpu pada **kapabilitas**: kemampuan menghasilkan lebih banyak nilai tambah, lebih banyak pekerjaan bermutu, lebih banyak inovasi, dan lebih banyak kelas menengah produktif. ([OECD](#))

Dalam makna terdalam, transformasi struktural adalah proyek peradaban ekonomi. Ia menuntut keberanian untuk membenahi pasar, mereformasi aturan, membangun manusia, memodernisasi kota, dan mengubah komposisi investasi. Ia juga menuntut disiplin untuk tidak puas pada angka pertumbuhan semata. Indonesia yang bergerak dari konsumsi ke produktivitas adalah Indonesia yang bukan hanya lebih besar, tetapi lebih cerdas; bukan hanya lebih ramai pasarnya, tetapi lebih dalam basis produksinya; bukan hanya lebih tahan dalam jangka pendek, tetapi lebih kuat dalam jangka panjang. Dan justru di situlah masa depan ekonomi Indonesia akan ditentukan.

Berikut **glosarium** dan **referensi** untuk esai “**Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia: Dari Konsumsi ke Produktivitas.**” Basisnya terutama sumber resmi: BPS, IMF, OECD, World Bank, dan ADB. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Transformasi struktural: perubahan komposisi perekonomian ketika tenaga kerja, modal, dan aktivitas usaha bergeser dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bukan hanya perpindahan dari pertanian ke kota, tetapi juga perpindahan ke manufaktur, jasa modern, dan aktivitas bernilai tambah lebih tinggi. ([OECD](#))

Konsumsi rumah tangga: pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa akhir. Dalam ekonomi Indonesia, konsumsi swasta masih dipandang sebagai mesin utama pertumbuhan, tetapi tidak cukup sendirian untuk mendorong lompatan pendapatan tanpa dukungan produktivitas. ([OECD](#))

Produktivitas: kemampuan ekonomi, sektor, perusahaan, atau pekerja menghasilkan output yang lebih besar dari input yang digunakan. Dalam agenda pembangunan, produktivitas menentukan apakah pertumbuhan hanya besar secara angka atau juga kuat secara kualitas. ([IMF](#))

Produktivitas tenaga kerja: nilai tambah atau output yang dihasilkan per pekerja atau per jam kerja. OECD menempatkan perlambatan produktivitas tenaga kerja sebagai salah satu alasan mengapa konvergensi pendapatan Indonesia bergerak lebih lambat. ([OECD](#))

Total Factor Productivity (TFP): ukuran efisiensi gabungan penggunaan tenaga kerja, modal, teknologi, dan organisasi. Kenaikan TFP menunjukkan bahwa ekonomi menjadi lebih efisien, bukan sekadar menggunakan lebih banyak input. World Bank menyoroti pentingnya

TFP dalam fondasi pertumbuhan digital dan transformasi jangka panjang. ([World Bank](#))

Nilai tambah: selisih antara nilai output yang dihasilkan dengan nilai input antara yang dipakai dalam proses produksi. Semakin tinggi nilai tambah yang diciptakan di dalam negeri, semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan kualitas pertumbuhan. ([OECD](#))

PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto): komponen PDB dari sisi pengeluaran yang mencerminkan investasi pada bangunan, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya. BPS menggunakan PMTB sebagai indikator penting untuk membaca dinamika investasi Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Industrialisasi: proses penguatan industri pengolahan sebagai basis nilai tambah, produktivitas, ekspor, dan penciptaan pekerjaan formal. Dalam pembacaan mutakhir, industrialisasi juga mencakup integrasi dengan jasa modern, logistik, teknologi digital, dan keterampilan teknik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Hilirisasi: strategi memperpanjang rantai nilai di dalam negeri dengan mengolah bahan mentah menjadi produk antara atau produk jadi. Kebijakan ini baru benar-benar produktif bila disertai transfer teknologi, industri turunan, dan penguatan kemampuan domestik. ([OECD](#))

Jasa modern / jasa produktif: sektor jasa yang menopang efisiensi seluruh ekonomi, seperti logistik, telekomunikasi, keuangan, perangkat lunak, konsultasi, dan layanan profesional. World Bank menilai daya saing jasa menjadi kunci bagi pertumbuhan dan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia. ([Open Knowledge World Bank](#))

Formalisasi: proses ketika usaha dan pekerjaan masuk ke sistem resmi melalui pencatatan, kepatuhan hukum, akses pembiayaan formal, dan perlindungan sosial. Formalisasi penting karena membantu usaha naik

kelas dan biasanya berkaitan dengan produktivitas yang lebih tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pekerjaan kelas menengah (*middle-class jobs*): pekerjaan yang memberikan tingkat pendapatan, stabilitas, dan prospek mobilitas sosial lebih baik dibanding pekerjaan bernilai tambah rendah. World Bank memakai konsep ini untuk menilai kualitas struktur ketenagakerjaan Indonesia. ([Open Knowledge World Bank](#))

Informalitas: keadaan ketika pekerjaan atau usaha berjalan di luar kerangka formal, dengan perlindungan, akses pembiayaan, dan pencatatan yang terbatas. Tingginya informalitas menjadi salah satu hambatan utama transformasi produktif pasar kerja Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Fondasi digital (*digital foundations*): infrastruktur dan kapasitas dasar yang memungkinkan ekonomi digital bekerja produktif, seperti broadband, 5G, pusat data, interoperabilitas data, dan kemampuan digital SDM. World Bank menempatkan fondasi digital sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan masa depan Indonesia. ([World Bank](#))

Urbanisasi produktif: pertumbuhan kawasan perkotaan yang meningkatkan produktivitas karena mendekatkan pekerja, perusahaan, perumahan, transportasi, dan pasar dalam ekosistem yang lebih efisien. Laporan World Bank Juni 2025 menempatkan perumahan dan kota sebagai bagian dari strategi pertumbuhan dan penciptaan kerja. ([The World Bank](#))

Modal manusia (*human capital*): gabungan pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas adaptasi penduduk yang menentukan produktivitas tenaga kerja. ADB menegaskan bahwa penguatan modal manusia Indonesia dibutuhkan untuk mendorong produktivitas. ([Asian Development Bank](#))

Persaingan usaha / *competitive neutrality*: kondisi ketika pelaku usaha bersaing dalam aturan yang relatif setara, tanpa distorsi berlebihan yang menghambat pemain baru atau perusahaan yang lebih efisien. OECD menilai penguatan persaingan dan *competitive neutrality* penting untuk produktivitas Indonesia. ([OECD](#))

Transisi hijau: pergeseran menuju sistem ekonomi yang lebih rendah emisi, lebih efisien energi, dan lebih tahan terhadap risiko perubahan iklim. OECD menilai digitalisasi, produktivitas, dan transisi hijau sebagai kunci kemakmuran masa depan Indonesia. ([OECD](#))

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y).* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

International Monetary Fund. (2026, 21 Januari). *IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation with Indonesia.* ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press Release, Staff Report, and Statement by the Executive Director for Indonesia.* ([IMF](#))

OECD. (2024, 26 November). *Indonesia: Stronger productivity, digitalisation, green transition are key to the country's future prosperity.* ([OECD](#))

OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024.* OECD Publishing. ([OECD](#))

World Bank. (2026). *Indonesia Country Growth and Jobs Report.* ([Open Knowledge World Bank](#))

World Bank. (2026). *Services Competitiveness for Growth and Jobs in Indonesia.* ([Open Knowledge World Bank](#))

World Bank. (2025, Desember). *Indonesia Economic Prospects: Digital Foundations for Growth.* ([World Bank](#))

World Bank. (2025, Juni). *Indonesia Economic Prospects: People-First Housing—A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia.* ([The World Bank](#))

Asian Development Bank. (2025, 10 Desember). *ADB Further Strengthens Indonesia's Human Capital to Boost Productivity.* ([Asian Development Bank](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 4 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a77cb3-4224-839e-9326-8adaae34c9c3>